

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE DIREKTORAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**Efektifitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam
oleh BUMDESA di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul**

Ketua :

Dr. Benny Djaja, S.H., SE., M.Hum., M.M., M.Kn (Ketua)
NIDN : 0322086307

Anggota :

Yuwono Prianto, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 0308056302

**Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2019**

**LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE DIREKTORAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**Efektifitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam
oleh BUMDESA di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul**

Ketua :

Dr. Benny Djaja, S.H., SE., M.Hum., M.M., M.Kn (Ketua)
NIDN : 0322086307

Anggota :

Yuwono Prianto, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 0308056302

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2019

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
SEMESTER GANJIL / TAHUN 2019**

1. Judul Penelitian : Efektifitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam oleh BUMDESA di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., M.M
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 0322086307
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor (dalam proses)
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat : Perumahan Citra 2 Blok L3/12, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, 11830
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax : 089993330513
 - j. Email : notaris.bennydjaja@gmail.com
3. Anggota Tim Peneliti :
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota / Keahlian : Yuwono Prianto, S.H., M.H.,
 - c. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - d. Nama Mahasiswa :
 - Narumi Bungas Gazali
 - M. Naufal Alfaraz
 - Eddy Suntoso
 - Ivana Setio
 - Nicholas Rachmanata
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Kabupaten Gunung Kidul
5. Luaran yang Dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan: Februari-Juni 2019
7. Biaya yang Disetujui DPPM : Rp. 20.500.000,00

Jakarta, 18 Juli 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
NIP : 10291010

Ketua Peneliti

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.Hum., M.Kn., M.M.
NIP : 0322086307

Menyetujui,
Direktur Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat



Jap Tji Beng., PhD
NIP : 100381047

RINGKASAN DAN SUMMARY

A. Ringkasan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa mulai dilihat sebagai tempat yang strategis dan menjadi penyangga utama kehidupan warga kota. Dipilihnya Kabupaten Gunung Kidul sebagai didasarkan pada terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan bila dibandingkan pada dekade 60-70an & melimpahnya potensi sumber daya alam di kabupaten tersebut. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih produktif dan efektif. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sebanyak 64% desa-desa di Indonesia memiliki BUMDes tetapi masih banyak BUMDes yang perlu mendapat pendampingan. Perkembangan pesat pada BUMDes terjadi pada sektor pariwisata yang dibentuk berdasarkan kondisi alam masing-masing desa. Kurangnya tenaga sumber daya manusia, kualitas kepemimpinan kepala desa, serta pengembangan budaya hukum masyarakat desa merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam mengelola BUMDes di tanah air mengingat Indonesia memiliki beragam potensi & kekayaan alam. Sedikitnya baru terdapat 6.000 BUMDes yang berjalan efektif. Kata Kunci : BUMDES, Efektivitas Pengelolaan BUMDes, Sumber Daya Alam

B. Summary

Since the enactment of the Village Law No. 6 In 2014, the village began to be seen as a strategic place and became the main buffer for the lives of the citizens of the city. The Gunung Kidul Regency was chosen as based on a significant increase in community welfare when compared to the 60-70s decade & the abundant potential of natural resources in the district. BUMDes aims to improve the village economy by considering aspects of village needs and potential which aim to make the community more productive and effective. The Ministry of Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Villages (Kemendes PDTT) noted that as many as 64% of villages in Indonesia have BUMDes but there are still many BUMDes that need assistance. The rapid development of BUMDes occurred in the tourism sector which was formed based on the natural conditions of each village. The lack of human resources, the quality of the village head's leadership, and the development of the village community's legal culture are factors that influence the effectiveness in managing BUMDes in the country because Indonesia has a variety of potentials and natural wealth. At least there are only 6,000 BUMDes that are running effectively.

Keywords: BUMDES, Effectiveness of Management of BUMDes, Natural Resources

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
A. Ringkasan	Error! Bookmark not defined.
B. Summary	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	i
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Konseptual	13
B. Kerangka Teoritis.....	16
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis & Sifat Penelitian	27
BAB IV.....	30
DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Profil Kabupaten Gunung Kidul.....	30
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	41
C. Hasil Penelitian dan Wawancara	47
1. Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta	47
2. Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.....	48
3. Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta	50
4. Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta	54
5. Desa Krambil Sawit, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta	55

6. Desa Kanigoro, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta	57
BAB V	61
ANALISIS	61
A. Efektivitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam Non Hayati Oleh BUMDes Di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul	61
B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Ketentuan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam Non Hayati Oleh BUMDes Di Wilayah Pesisir Kabupaten Gunung Kidul	69
1. Sumber Daya Manusia	72
BAB VI	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kandungan kekayaan alam yang melimpah, baik berupa hasil bumi, hasil tambang, hasil laut serta bentang alamnya yang indah dengan keanekaragaman hayati dan non hayati yang jarang dapat ditemui di negeri lain, yang menjadi modal dasar bagi rakyat Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat hidup layak dan sejahtera.

Keberagaman Indonesia tidak sebatas pada budaya, ras, Bahasa daerah, suku bangsa, agama, dan kepercayaan tetapi juga keadaan geografisnya. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis yang berbeda di setiap daerahnya namun ironisnya kekayaan melimpah yang dimiliki oleh Indonesia belum dapat mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Kekayaan Indonesia akan sumber daya alam membuat Indonesia menjadikan sektor komoditas sebagai salah satu penopang utama perekonomian. Celaknya harga komoditas sangat terpengaruh oleh harga komoditas dunia yang terkenal akan volatilitasnya, nilai tukar mata uang asing, dan beberapa faktor eksternal seperti kondisi perekonomian negara lain.

Masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah disparitas pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan yang implikasi cukup serius karena ikut menghadirkan berbagai persoalan sosial baru dengan adanya urbanisasi yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Kondisi di desa semakin sepi ditinggalkan oleh para generasi mudanya dan tersisa penduduk yang hanya bertumpu pada sektor pertanian dengan pengelolaan yang dilakukan dengan sistem tradisional serta bergantung pada musim dan kondisi lahan. Secara rasional, hal ini terjadi karena masyarakat berusaha mencari tempat/ daerah yang relatif lebih potensial baik secara kesempatan maupun ekonomis. Kondisi perekonomian desa semakin rapuh karena semakin berkurangnya para generasi muda yang lebih memilih tinggal di perkotaan dibandingkan bertahan pada keadaan desa yang tradisional dan memberikan pendapatan secara cepat dan langsung.

Kota kerap memiliki visi modern dan dinamis sedangkan desa berkarakter lamban dan tradisional. Keadaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya cenderung

dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.¹ Guna menghentikan ketimpangan pembangunan kota dan desa, pemerintah secara maksimal siap menerapkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, desa mulai dilihat sebagai tempat yang strategis dan menjadi penyanggah utama dari kehidupan warga kota. Marwan Jafar selaku Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengemukakan bahwa desa terdapat berbagai sumber daya alam yang melimpah mulai dari hutan, pertanian, hasil pesisir, dan laut. Kemandirian ekonomi desa harus diawali dengan kedaluatan rakyat atas sumber daya alamnya dengan demikian desa dapat memperoleh kesejahteraan secara berkelanjutan.²

Menteri Desa sejak pertama kali Indonesia merdeka telah mengasumsikan jika 60% dana desa bisa direalisasikan secara tepat untuk pembangunan infrastruktur desa maka akan terbangun sekitar 24.500 Km jalan desa, 16.800 unit jembatan desa dan 4.900 Km irigasi desa. Hasil studi yang dilakukan oleh NFID dan OXFAM pada 2017 silam menyebutkan bahwa ketimpangan infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan berkualitas semakin memperbesar ketimpangan imprasial antara pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi, ketimpangan kesejahteraan semakin terlihat jelas yang disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah berbanding terbalik dengan tingginya angka pengangguran.³

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah telah mencanangkan berbagai program pembangunan daerah namun ketimpangan pertumbuhan antara desa dan kota tetap tidak dapat dihindari. Sebagaimana terlihat bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan penduduk pedesaan dengan perbandingan antara penduduk kota dengan desa adalah 56% : 44%. Ketimpangan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dimana kemiskinan di desa mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan perkotaan. Oleh karenanya sangat diperlukan langkah strategis guna menciptakan penyeimbangan pembangunan desa dan kota, salah satunya dengan penguatan pembentukan BUMDes.

¹ <https://mediaharapan.com/upaya-strategis-membangun-masyarakat-desa/>

² <http://tabloid-desa.com/stop-ketimpangan-pembangunan-antara-kota-dan-desa/>

³ <https://www.antaraneews.com/berita/621775/ketimpangan-pembangunan-daerah-ciptakan-kesenjangan-kota-dan-desa>

Menteri PPN/ Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepada setiap kepala daerah untuk dapat menjadi pemimpin yang kreatif serta inovatif dalam membangun daerah yang dipimpinnya. Dengan membuat daerah menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing merupakan salah satu tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menjadikan Indonesia lebih berdaulat.⁴ Berdasarkan Permendes No. 21 Tahun 2015 pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa dalam tiga hal yaitu infrastruktur, pelayanan sosial dasar, dan peningkatan kapasitas ekonomi desa. Dengan demikian pemerintah menghimbau seluruh warga masyarakat untuk mengawasi jalannya penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Penggunaan dana desa telah memberikan berbagai dampak positif terhadap desa yang ditandai dengan menurunnya gini rasio di desa dari 0,33% menjadi 0,27% yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Keberhasilan dana desa yang diberikan setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membuat pemerintah pusat meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk dana desa.⁵

Salah satu cara utama mematahkan “kutukan” tersebut adalah dengan berhenti menggantungkan diri dari sektor komoditas tambang dan bahan galian. Selama ini kekayaan alam Indonesia sudah banyak dieksploitasi oleh pihak asing. Dari sektor jasa, pemerintah seharusnya bisa melihat potensi besar di bidang pariwisata. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keindahan alam yang luar biasa & banyak yang belum dioptimalkan dengan baik. Dengan jumlah penduduk yang besar dan persentase menengah yang cukup signifikan sudah seharusnya sektor pariwisata bisa menjadi penopang baru perekonomian Indonesia.

Berita Resmi Statistik 2018 menunjukkan bahwa setelah 72 tahun merdeka dari penjajahan, angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi pada kisaran 7,26 %, artinya sekitar 26,58 juta penduduk hidup dalam keadaan miskin, 16,31 juta jiwa ada di desa-desa terutama desa pesisir.⁶ Sementara itu masih berlangsung kesenjangan antara masyarakat desa dengan kota.⁷ Disamping potensi hayati seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang, wilayah pesisir mempunyai potensi non hayati seperti

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3393018/sumber-daya-alam-ri-meliminasi-tapi-masyarakat-belum-sejahtera>

⁵ <https://www.beritasatu.com/nasional/353352/dana-desa-berikan-dampak-positif-bagi-masyarakat-desa>

⁶ <https://www.bps.go.id/webiste/images/BRS-KEMISKINAN-JAN-2018-Ind.jpg>

⁷ Mochamad Syawie, “Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial”, *Informasi*, vol. 16 Nomor 03 Tahun 2011, hal 218.

mineral dan bahan tambang serta pariwisata.⁸ Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya yang tergolong di bawah garis kemiskinan, seringkali dianggap sebagai haluan belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah.⁹

Menurut Nurmalasari, penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi yang menyebabkan penambahan “nilai” wilayah pesisir menimbulkan masalah pengelolaan, memicu konflik pemanfaatan akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.¹⁰ Sementara, penduduk di sekitar pesisir pada umumnya hidup miskin dan kerap berada pada situasi kritis, berlangsung lintas generasi dengan pendapatan di bawah standar yang ditetapkan Bank Dunia.¹¹ Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai tidak sekaligus dapat menyelesaikan masalah pemanfaatan secara merata bagi masyarakat di daerah.¹² Permasalahan yang akan dikaji adalah efektifitas ketentuan yang memberi prioritas pengelolaan sumber daya alam non hayati oleh BUMDes di wilayah pesisir dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas ketentuan Pasal 90 C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sebanyak puluhan ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah terbentuk namun masih banyak BUMDes yang perlu mendapat pendampingan. Menurut data yang diperoleh Kemendes PDTT, sudah terbentuk sekitar 41.000 BUMDes dari total 74.957 desa di Indonesia yang artinya sudah 64% bahkan mendekati 70% desa-desa di Indonesia memiliki BUMDes. Pendampingan yang perlu dilakukan bertujuan agar masyarakat memahami bahwa BUMDes bukan hanya berdiri, bukan hanya dilegalkan dengan perdes tetapi diharapkan setelah pendiriannya dapat bertumbuh dan berkembang.¹³

⁸ Adi Waluyo, “Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Simenep, Madura)” *Jurnal Kelautan*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2014, hal. 75

⁹ Muhammad Ilham Anisaputra, “Penguasaan Tanah dan Wilayah Pesisir di Indonesia”, *Jurnal Prespektif Hukum*, Vol. 15, No. 1 Mei 2015, hal 34

¹⁰ Muhammad Dio Fabianto Berhito & Pieter Th, “Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Teknologi*, Vol. 11 No. 2, 2014, hal 2016.

¹¹ Yuwono Prianto, “Mencari Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Pesisir”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat III 2016, hal. 577

¹² Finalia & Magdalena Zebia, “Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kepada Masyarakat”, *Dialogia Iuridica*, November 2011, Vol. 13, No.1, hal 135

¹³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4318416/ri-punya-41000-bumdes-tersebar-di-74957-desa>

BUMDes memiliki beragam jenis usaha namun paling banyak berkembang pada sektor pariwisata. Kebanyakan BUMDes condong membentuk unit usaha di sektor pariwisata karena melihat kondisi alam di desanya masing-masing, bahkan dengan adanya unit usaha pada sektor pariwisata dapat mempercepat perkembangan BUMDes. Kurangnya tenaga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola BUMDes menyebabkan pelaksanaan BUMDes di tanah air sedikit terhambat dan sedikitnya baru ada 6.000 BUMDes yang berjalan efektif.¹⁴

Pemerintah pusat mengambil langkah preventif yaitu dengan membentuk perusahaan induk dari BUMDes untuk membantu pengelolaan BUMDes. Sebelumnya Kemendes PDPT dan Perum Bulog membentuk perusahaan Mitra BUMDes yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Sehingga ke depannya subsidi tidak lagi di pasar tetapi langsung ke petani melalui kartu sehingga tepat sasaran. Pembentukan PT. Mitra BUMDes Nusantara bertujuan sebagai *holding* untuk mengkoordinir BUMDes di desa-desa dengan kepemilikan saham 51% sementara sisanya dimiliki oleh BUMDes. Alasan penggantian Bulog dikarenakan Lembaga tersebut mampu menjangkau daerah pertanian dan memahami proses pascapanen.¹⁵

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah terbangunnya pemahaman hukum dan motivasi pengurus BUMDes dilokasi penelitian dalam memainkan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 90 C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Urgensi penelitian ini adalah dalam rangka pembentukan atau pengaktifan kembali lembaga keuangan ditingkat kelurahan atau desa seperti BUMDesa yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan modal bagi masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan Desa.¹⁶ Penelitian ini memiliki tingkat rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga layak kiranya untuk dapat di setujui guna direalisasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, tim pengusul memilih Kabupaten Gunung Kidul sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa kabupaten tersebut telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada dekade 60-70an abad 20 dikenal sebagai nilai yang *minus* karena masyarakatnya secara umum belum mampu mengembangkan potensi

¹⁴ <https://investor.id/archive/desa-kekurangan-sdm-pengelola-bumdes>

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Soenyono, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan", *ADI : Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 01, hal. 4

SDA sehingga mereka pikir dalam garis kemiskinan, disamping kondisi alamnya tandus yang pada umumnya merupakan Kawasan *karst* (gunung kapur). Dengan makanan pokok berupa jagung dan ketela pohon (singkong).

Seiring dengan berjalannya waktu, berkat bimbingan secara berkesinambungan oleh civitas akademika UGM yang kala itu dipimpin oleh Prof. Kusnadi Hardjasoemantri mulai dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan menyalakan keterbatasan lingkungan sekaligus menggolong bantuan internasional dan nasional serta dalam negeri secara bertahap potensi alam yang ada di Kabupaten Gunung Kidul mulai dikelola oleh warga lokal dan menjadi destinasi wisata oleh warga masyarakat disekitar Pulau Jawa dan berkembang menjadi destinasi wisata nasional serta mulai dikenal oleh para turis mancanegara.

Dari kunjungan Tim beberapa tahun yang lalu, diketahui kondisi Kabupaten Gunung Kidul sudah sangat jauh berubah seperti jalan-jalan desa sudah diaspal dengan hotmix yang mulus dengan ratusan destinasi wisata, bahkan saat ini sudah banyak desa yang mendeklarasikan desanya sebagai desa wisata dengan ciri khas masing-masing seperti sungai-sungai bawah tanah, pantai-pantai yang eksotis, goa purba, situs kuno peninggalan kerajaan Mataram Hindu, kuliner lokal yang khas, dan sebagainya. Bahkan penghasilan satu titik destinasi wisata dapat melampaui PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gunung Kidul berkat kreativitas warga sekitar dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada di lingkungannya dibawah bimbingan berbagai kampus di Jawa Tengah termasuk di antaranya Universitas Tarumanagara yang sudah matang pembinaan di 7 (tujuh) desa pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul.

Gunung Kidul memiliki objek wisata alam unggulan berupa 46 kawasan pantai sepanjang 70 Km. tiap objek wisata yang terletak di Kawasan Gunung Kidul memiliki karakteristik dan keunikan sendiri. Terdapat 400 goa bawah tanah yang di dalamnya mengalir sungai menuju pantai selatan dan sebagai objek wisata alam yang diunggulkan diantaranya Gua Pindul dan Gua Kali Suci. Hasil dari pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh masyarakat setempat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengelola objek wisata secara profesional yang ada di daerah tersebut.¹⁷

¹⁷ <https://jogja.antaranews.com/berita/299005/potensi-objek-wisata-alam-gunung-kidul-beragam>

Pemanfaatan dan eksploitasi akan sumber daya alam di daerah Gunung Kidul belum dilakukan secara maksimal. Luas Kawasan pertambangan *karst* yang berada di sekitar Kabupaten Gunung Kidul; adalah sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas Kabupaten tersebut yang hanya sebesar 1483 km persegi. Terdapat beberapa usaha pertambangan baik yang skala besar maupun skala kecil (pertambangan rakyat) yang melakukan eksploitasi di Kawasan Gunung Kidul. Data dari EDSM menunjukkan terdapat 7 perusahaan yang menambang batu gamping dengan total luas eksploitasi 40 ribu meter persegi. Warga dihadapkan pada pilihan yang sulit anatar kelestarian lingkungan dengan ekonomi.¹⁸

Menilas balik pada awal tahun 1960 sampai dengan 1970-an, Gunung Kidul merupakan daerah yang sangat miskin dan terbelakang dimana kemiskinan mencapai pada puncaknya yang terlihat pada banyaknya busung lapar yang terjadi di banyak desa di daerah tersebut. Wilayah Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumber daya alam tambang yang termasuk golongan C berupa : batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa.

Sumber daya alam yang melimpah di Kawasan pesisir seperti Kabupaten Gunung Kidul seharusnya seirama dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada kenyataannya terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir. Dalam konteks ini desa-desa pesisir di Indonesia selalu dihadapkan pada empat permasalahan pokok yaitu tingginya kemiskinan masyarakat pesisir, kerusakan sumber daya alam pesisir, rendahnya kemandirian oerorganisasi sosial desa, dan minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di wilayah pemukiman desa.¹⁹

Kabupaten Gunung Kidul dengan karakteristik daerah batuan karst dan kawasan pesisir membuat masyarakat sekitar bergantung pada potensi alam hayati maupun non hayati sebagai sumber penghidupan. Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki potensi sngat unik jika ditinjau dari sudut ekonomi, sosial, dan ekologi. Masyarakat pesisir secara sosial berada dalam kemajemukan, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan

¹⁸ <https://www.mongabay.co.id/2012/09/12/dilema-tambang-karst-gunung-kidul-kebutuhan-perut-vs-melindungi-alam/>

¹⁹ Leo Agustino, "Implementasi Program Pesisir Tangguh Di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga", *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Vol. 13, No.1, 2017, hal. 1954

dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain. Secara ekonomi, taraf kehidupan masyarakat pesisir termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin dan ketergantungan hidupnya akan pemberdayaan alam disekitarnya sangat tinggi.

Wilayah pesisir dan kelautan merupakan wilayah yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia karena memiliki potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar dan khas di dalamnya. Mengingat potensi sumber daya alam pesisir dan kelautan yang sangat besar maka wilayah pesisir dan kelautan merupakan modal pembangunan dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia yang antara lain berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata, dan transportasi. Kekayaan tersebut telah menimbulkan ketertarikan dari berbagai pihak untuk memanfaatkannya sehingga sebagian besar penduduk yang menghuni wilayah pesisir menjadikannya sumber penghidupan.²⁰

Secara ekologi, masyarakat pesisir pada umumnya memiliki kesadaran yang rendah atas haknya mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik serta pentingnya keberlanjutan sumber daya alam. Degradasi lingkungan wilayah pesisir dan lautan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal masyarakat pesisir. Faktor internal antara lain tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap laut, kemiskinan penduduk lokal dan ketiadaan mata pencaharian alternative, pemahaman masalah lingkungan yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat, kurang kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta lemahnya penegakan hukum. Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh dinamika lingkungan laut dan mengikatnya permintaan terhadap produksi perikanan.²¹

Permasalahan yang dihadapi menyebabkan mereka memanfaatkan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dan kurang peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan sehingga tidak heran jika di wilayah pesisir telah terjadi degradasi seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati, abrasi pantai, dll. Dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat diperlukan upaya berkelanjutan membina masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dari empat aspek yaitu manusia, lingkungan, sumber daya alam, dan usaha. Pemberdayaan yang dilakuakn diharapkan dapat menciptakan kemandirian masyarakat untuk dapat melakukan

²⁰ Mella Ismelina, *et. all*, "Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir dan Lautan Secara Berkelanjutan", *Ethos*, Vol. III, No.1, Januari-Juni 2005, hal. 56.

²¹ *Ibid.*

tantutan akan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat serta mampu berkehendak untuk menjalankan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan disekitarnya.

Beragam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di bidang ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen kelautan dan Perikanan (DKP) dengan membuat program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), sedangkan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai haknya atas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah melalui kantor Kementerian Lingkungan Hidup membuat program masyarakat mandani. Upaya yang telah dilakukan tersebut bertujuan mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat pesisir. Namun, upaya tersebut belum begitu efektif dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, dan ekologi yang dialami oleh masyarakat pesisir.²²

Sebagai contoh di daerah Gunung Kidul memiliki potensi bahan baku pandan terbesar di DIY. Terdapat sekitar 200 jenis daun pandan yang berada di daerah pegunungan dan sepanjang Pantai Kukup tetapi belum dikelola secara maksimal. Padahal di daerah lain telah diolah menjadi berbagai kerajinan seperti tas, aneka keranjang, tikar, kursi, dan meja. Warga sekitar berharap peranan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia agar terciptanya kemakmuran rakyat melalui BUMDES.²³

Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan. Konsep ini telah dianut oleh masyarakat Kabupaten Situbondo dimana mereka mengembangkan konsep pembangunan pedesaan yang berbasis pada potensi desa melalui kelembagaan BUMDes.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi desa, lembaga ekonomi desa memiliki peranan yang penting dalam tumbuh kembangnya ekonomi desa. Pembentukan BUMDes sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

²² *Ibid*, hal. 56-57

²³ <https://www.antaranews.com/berita/259193/ugm-kembangkan-potensi-sda-gunung-kidul>

berbagai kegiatan usah ekonomi masyarakat pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.²⁴

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih produktif dan efektif. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa dengan menggunakan prinsip dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes telah banyak menjawab permasalahan yang ada di desa terutama menjawab permasalahan tern industry usaha kecil menengah yang mulai menurun.

BUMDes telah menjadi ikon ketiga terpenting dalam desa menyusul Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dimaksudkan sebagai wadah usaha desa dengan spirit kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Upaya menjadikan BUMDes sebagai basis penguatan ekonomi lokal di Jawa Timur sudah berlangsung sejak disahkan peraturan mengenai BUMDes itu sendiri. Pendirian BUMDes disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi masing-masing desa. Agar BUMDes dapat lebih optimal, maka penyesuaian pembentukan BUMDes berdasarkan potensi dari masing-masing desa adalah hal yang harus diberikan perhatian penuh.²⁵

Kesuksesan pelaksanaan suatu program membutuhkan beberapa hal yang membuatnya menjadi suatu program yang dikatakan berhasil memberdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaan BUMDes Gerbang Lentera, Desa Lerep keberhasilannya ditunjang oleh beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, partisipasi pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, dukungan Pemerintah, dan kerjasama dengan pihak ke tiga.²⁶

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian yang dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan secara berkelanjutan. Pembangunan desa kiranya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang

²⁴ <https://jurnal.unhas.ac.id/artikel/2018-04-07-88-Jurnal%20PAK%20YUDHIS%20DAN%20IQBAL.pdf>

²⁵ https://Repository.Unair.ac.id/74653/3/JURNAL_Fis.AN.68%2018%20Jun%20p.pdf

²⁶ <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ips/article/download/21911/20172>.